

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Committee to Protect Journalist atau dapat disingkat sebagai CPJ merupakan organisasi *non-profit* dan *non-governmental* milik Amerika Serikat yang memiliki perwakilan di berbagai negara-negara di dunia. Terbentuk pada tahun 1981 oleh sekelompok koresponden dari Amerika Serikat, mereka menyadari bahwa banyak Jurnalis yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka sebagai jurnalis. Banyak dari para jurnalis mengalami kekerasan ketika mereka menjalankan tugas mereka, maka dengan ini CPJ terbentuk sebagai upaya untuk melindungi para jurnalis. Melalui setiap perwakilan CPJ di setiap negara yang terjun langsung pada setiap kasus untuk membantu baik Jurnalis maupun *media workers* agar mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak-hak mereka dalam pers. Tidak mengurangi peran sebuah negara dalam menangani masalah impunitas di negaranya sendiri melalui lembaga-lembaga resmi milik pemerintah yang sudah diadakan, CPJ membantu organisasi lokal yang ada didalam sebuah negara yang menganut isu terhadap jurnalis dan impunitas agar dapat mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu terkait hal diatas.

CPJ melaporkan tentang pelanggaran di negara-negara yang represif, memiliki zona konflik, dan negara demokrasi. Dewan jurnalis terkemuka dari seluruh dunia akan membantu untuk memandu kegiatan CPJ. Misi dari CPJ sendiri adalah memiliki komite untuk melindungi Jurnalis agar dapat mempromosikan kebebasan pers di seluruh dunia dan membela hak jurnalis untuk melaporkan berita tersebut dengan aman dan tanpa takut akan pembalasan. CPJ melindungi kebebasan arus berita dan komentar dengan mengambil tindakan di mana pun wartawan yang berada dalam ancaman (Journalist C. t., 2018).

Advokasi merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan tersebut (Tomatimasang, 2000). Dalam kamus bahasa inggris advokasi atau *to advocate* berarti membela, memajukan, atau mengemukakan dan berusaha menciptakan yang baru atau yang belum pernah ada sebagai perubahan (Holloway, 1985).

Tujuan utama advokasi adalah agar adanya perubahan dalam kebijakan publik. Dalam prosesnya advokasi memuat sejumlah aktivitas yang bertujuan agar mempengaruhi pembuatan sebuah keputusan (Cohen, 2001). Advokasi hanyalah salah satu dari perangkat dan proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah (Tomatimasang, 2000).

Advokasi bukan proses revolusi yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik kemudian melakukan perubahan secara menyeluruh sistem dan struktur kemasyarakatan. Berbeda dengan revolusi, advokasi didasarkan pada asumsi bahwa perubahan sistem dan

struktur kemasyarakatan yang lebih luas dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan kebijakan publik secara bertahap (gradual and incremental changes). (Azizah, 2014)

Meksiko, Kolombia, dan Brasil telah menempati peringkat tiga negara terkemuka di Amerika Latin dengan tingkat impunitas tertinggi terhadap pembunuhan jurnalis, menurut indeks impunitas oleh Committee to Protect Journalists (CPJ). Meksiko bahkan telah melampaui semua negara yang dilanda perang ketika menyangkut penangkapan sejumlah jurnalis, menjadikannya negara paling berbahaya di dunia untuk pekerja media. Di seluruh spektrum Amerika Latin untuk 2018 saja, Meksiko telah menghitung setidaknya sepuluh jurnalis yang telah terbunuh sementara Brazil berjumlah tiga dan Kolombia, dua. Namun, ini gagal untuk memasukkan ancaman verbal terhadap pers dan diyakini bahwa, karena ketakutan, sejumlah lebih banyak kasus di seluruh Amerika Latin terus tidak dilaporkan. Tidak seperti Suriah, Somalia dan Afghanistan, Amerika Latin terus memiliki tingkat pembunuhan yang tinggi meskipun dianggap damai.

Jurnalis merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah kondisi suatu negara yang kondusif dalam segi keamanan dan politik, seorang jurnalis dapat membawakan sebuah negara, sebuah kelompok, hingga seorang individu menjadi sangat baik atau sangat buruk di mata publik. Peran seorang jurnalis sangat penting dalam sebuah negara karena tugas jurnalis adalah melaporkan atau menginformasikan kepada publik apa saja yang terjadi sesuai dengan kode etik yang ada. Bersamaan dengan hal tersebut sudah sepantasnya sebuah negara dengan para penegak hukumnya melindungi para jurnalis dengan sebaik mungkin.

Sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights pada artikel ke 19 yang tertulis

: *“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”* (Universal Declaration of Human Rights article 19).

Sudah jelas dipaparkan bahwa kebebasan berekspresi dan beropini menjadi hak setiap manusia dan jika seseorang menghalangi hal tersebut maka ia telah merampas hak seseorang dalam kebebasan berekspresi.

“Mexico ranks among the most dangerous countries for journalist in the world” (Buckley, 2017).

Terbukti dari data oleh beberapa organisasi yang menelusuri tentang riwayat pembunuhan dan kekerasan terhadap jurnalis di Mexico. Menurut data dari CPJ dari tahun 2007 hingga 2017 telah terdapat tujuh-puluh empat jurnalis Mexico yang terbunuh, tiga-puluh tiga diantaranya telah terbukti terbunuh karena bersangkutan dengan pekerjaan mereka sebagai jurnalis. Jika menurut data dari *Justice in Mexico* terdapat seratus empat-puluh jurnalis dan *Media Worker* terbunuh, jurnalis dan politisi lebih banyak menjadi sasaran oleh sekelompok organisasi kriminal.

Meskipun kekerasan terhadap jurnalis terjadi dalam konteks krisis keamanan yang lebih luas, Komisaris Tinggi PBB untuk Manusia (OHCHR) dan Pelapor Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (IACHR) mengatakan bahwa kejahatan semacam itu “menyerang akar demokrasi hidup di Meksiko.” (OHCHR, 2017). Mungkin sebagian dari hal tersebut dapat terjadi akibat dari tekanan internasional, pemerintah Meksiko baru-baru ini telah melaporkan kemajuan dalam menyelesaikan beberapa kasus wartawan yang terbunuh pada 2017 (Nalvarte, April 24, 2018.). Meskipun beberapa pengamat skeptis dengan kemajuan yang dilaporkan, yang lain tetap berharap bahwa Meksiko akan mengambil tindakan yang

lebih tegas untuk menginvestigasi dan menuntut pembunuhan yang tidak diselesaikan dan untuk mencegah kejahatan di masa depan terhadap jurnalis.

Kongres menyatakan sebuah keprihatinan yang semakin meningkat tentang kebebasan pers di Meksiko. Hal ini menarik perhatian pihak asing untuk membantu pemerintah Meksiko dan masyarakat sipil untuk melindungi jurnalis dengan lebih baik dan menghilangkan impunitas dalam kasus-kasus kejahatan yang dilakukan terhadap mereka para Jurnalis (Marco, 2018). Pemerintah AS telah berfokus kepada penguatan upaya terhadap pemerintah Meksiko untuk melindungi jurnalis dan menyatukan para jurnalis, para pemilik media, para masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memiliki peran dalam memantau dan meningkatkan upaya perlindungan dan penuntutan terhadap pelanggaran yang terjadi (Gracia., 2018).

Dalam data statistik yang diinformasikan oleh CPJ langsung pada website resminya dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah tercatat sembilan-belas jurnalis yang terbunuh di Meksiko. Kasus pembunuhan terhadap jurnalis di Meksiko tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 6 korban yang terbunuh dan telah terkonfirmasi motifnya dalam kurun waktu satu tahun saja, tahun 2017 menjadi tahun dengan rekor tertinggi di Meksiko dalam sejarah pembunuhan terhadap jurnalis. Dalam hal ini CPJ mengupayakan untuk terus mendorong pemerintah Meksiko agar lebih memperhatikan terhadap hal yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan penegakan hukumnya dalam mengurangi impunitas terhadap para pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

Dalam usahanya CPJ mengupayakan sebuah kampanye anti impunitas. Angka impunitas di Meksiko telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Mengambil informasi dari surat kabar El Universal Meksiko menduduki peringkat ke empat dunia dan mencapai level tertinggi di benua Amerika dalam kasus impunitas.

Menurut laporan dari Global Index Of Impunity Mexico, masalah struktural yang disebabkan oleh kurangnya investasi di lembaga-lembaga negara, kurangnya hakim dan pengurangan ukuran pasukan polisi negara bagian adalah bagian dari masalah terjadinya impunitas di Meksiko.

Selain itu sistem peradilan yang menghadapi beban kerja berlebihan, kurangnya hakim di Meksiko yang hanya memiliki 3,9 hakim untuk setiap 100.000 penduduk. Contoh terburuk ada di bagian Puebla yang hanya memiliki 1,5 hakim per 100.000 penduduk.

Dari penelitian menetapkan bahwa fungsi sistem keamanan membaik namun strukturnya memburuk, namun pemerintah federal telah mengupayakan hal tersebut dengan menerapkan UU Keamanan dalam negeri (LSI) baru yang akan meresmikan peran militer dalam operasi memerangi kejahatan.

Kanselir Udlap Luis Ernesto Derbez memberikan laporan mengenai tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis di Meksiko “Negara kita sedang mengalami masa kritis dan hal tersebut adalah produk dari kemunduran dalam kinerja lembaga keamanan dan keadilan.” “negara Meksiko tidak mampu menjamin kondisi keamanan dasar bagi warganya” Pandangan tersebut tercermin dalam statistik pembunuhan tahun 2017 yang merupakan catatan terburuk di Meksiko setidaknya selama dua dekade terakhir. Derbez meminta enam

kandidat presiden untuk menguraikan langkah-langkah konkret untuk memerangi impunitas kriminalitas pelaku kejahatan terhadap jurnalis selama kampanye pemilihan di Meksiko tahun 2018.

Impunitas sistemik telah mengakar di tingkat negara bagian dan lokal di mana sebagian besar kejahatan anti-persidangan diselidiki. Sistem peradilan pidana telah gagal untuk berhasil menuntut lebih dari 90 persen kejahatan terkait pers selama dekade terakhir, penelitian CPJ menunjukkan. Meksiko menempati peringkat kesembilan terburuk di dunia berdasarkan Indeks Impunitas CPJ, yang menghitung jumlah pembunuhan jurnalis yang belum diselesaikan sebagai persentase dari populasi suatu negara

Dalam kasus demi kasus, CPJ telah menemukan pekerjaan yang tidak semestinya oleh jaksa dan polisi negara. Pihak berwenang telah menggunakan metode yang melanggar hukum, termasuk paksaan terhadap saksi dan pemalsuan bukti, pada beberapa kesempatan, dan terdapat sistem peradilan dikendalikan oleh para pelaku kriminalitas.

B. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk menjawab secara deskriptif bagaimana upaya dan proses advokasi yang dilakukan oleh *Committee to Protect Journalist* untuk menghilangkan angka impunitas pelaku kriminal terhadap jurnalis di Mexico pada tahun 2014 hingga 2018. Mexico merupakan sebuah negara yang Demokratis dimana kebebasan dalam pers dan kebebasan dalam memperoleh informasi seharusnya diberikan dan sudah seharusnya para jurnalis diberi perlindungan terhadap hak-haknya. Namun yang sedang terjadi di Meksiko pada lima tahun terakhir adalah semakin meningkatnya angka kekerasan terhadap jurnalis terlebih dalam hal tersebut para pelaku kejahatan terhadap jurnalis seringkali diberikan hak impunitas. CPJ sebagai aktor NGO membantu Meksiko mengupayakan dan mendorong pemerintah Meksiko untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan terhadap para jurnalis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah **“Bagaimana proses advokasi *Committee to Protect Journalist* dalam menghilangkan kasus Impunitas dan Kekerasan pelaku kriminalitas Terhadap Jurnalis di Mexico pada tahun 2014-2018?”**

D. Kerangka Teori

Dalam proses penulisan ini, penulis akan menggunakan teori yang relevan untuk penjelasannya. Sebagai kerangka dasar dari pemikiran dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan kerangka Teori dari Keck & Sikkink tentang *Transnational Advocacy Network* (TAN)

- a. Teori *Transnational Advocacy Network* (TAN)

Dalam dunia internasional Keck dan Sikkink memandang bahwa beberapa aktor internasional telah berinteraksi antar satu sama lain dan membentuk sebuah jaringan. Beberapa di antaranya adalah jaringan ilmuwan dan pakar yang memiliki ikatan profesional dan gagasan kausal yang dijadikan sebagai penopang untuk mempengaruhi kebijakan mereka (Haas, 1992).

Para aktor tersebut membahas suatu isu yang ada di skala internasional, mereka disatukan dalam wadah yang sama dan mereka bekerja sama untuk mengangkat sebuah isu yang berkaitan dengan norma atau fenomena terbaru. Selanjutnya adalah jaringan aktivis, dimana yang sebagian besar dibedakan oleh gagasan atau nilai-nilai berprinsip dalam memotivasi pembentukan diri mereka (Judith Goldstein and Robert Keohane, 1993). Keck dan Sikkink menyebutnya sebagai Jaringan Advokasi Transnasional.

Menurut Keck dan Sikkink suatu organisasi memiliki sebuah karakter komunikasi yang pertukarannya bersifat sukarela, horisontal, dan memiliki timbal balik (Sikkink, 2014). Sebuah jaringan muncul untuk merubah perilaku negara dan organisasi internasional ketika hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah tidak terakses secara baik. Keck dan Sikkink memberikan nama hal tersebut sebagai *Boomerang Pattern*, ketika penutupan akses kepada pemerintah terjadi maka para aktivis akan mencari sebuah dukungan dari luar negeri. Selain penutupan akses ke pemerintah, aktivis malah justru menjadikan jaringan tersebut sebagai tujuan perjuangan mereka, karena mereka percaya bahwa interaksi internasional akan tumbuh ketika sebuah jaringan terbentuk dan semakin kuat.

Ada yang menjadikan para aktor-aktor dalam konsep ini menjadi istimewa dan patut diperhitungkan, dimana mereka menggunakan soft power dan cenderung tidak menggunakan kekuatan fisik secara langsung seperti yang ekonomi dan militer lakukan, mereka menggunakan pengaruh mereka sebagai kekuatan.

Cara mereka melakukan advokasi pun menggunakan latar belakang tentang isu-isu yang terbaru dan secara khusus, sehingga hal tersebut menjadi sebuah ketertarikan dan menjadi pengaruh terhadap partisipasi dalam setiap kampanye yang mereka buat. Pada umumnya sebuah kebijakan hanya dibuat oleh pemerintah atau aktor tradisional, namun dengan adanya aktor pejuang advokasi atau para aktivis tersebut mereka dapat masuk dan membuka peluang untuk ikut serta membuat sebuah kebijakan. Dimana hal tersebut menjadikan *Transnational Advocacy Network* berperan untuk mengangkat sebuah isu dari masyarakat agar nantinya diperhatikan dan didengar oleh pemerintah.

Dalam mencari sebuah pengaruh sebuah jaringan transnasional menggunakan cara yang sama seperti kelompok politik atau gerakan sosial lainnya lakukan, tetapi karena mereka tidak kuat dalam pengertian tradisional, mereka harus menggunakan kekuatan informasi, ide, dan strategi mereka untuk mengubah informasi dan konteks nilai di mana negara membuat sebuah kebijakan (Sikkink, 2014). Keck dan Sikkink telah mengembangkan tipologi yang bernuansa tentang jenis taktik atau strategi yang digunakan jaringan untuk menganalisa proses advokasi dan strategi tersebut terbagi menjadi empat: *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

Information Politics merupakan kemampuan tentang mobilisasi sebuah informasi politik agar dapat memberikan sebuah pengaruh yang besar

Symbolic Politics adalah sebuah kemampuan untuk menggunakan simbol atau menyampaikan secara simbolik lebih tepatnya adalah ikon atau mengadakan suatu event untuk menjadi gambaran atau perwakilan dari suatu isu, hal tersebut dapat dilakukan juga secara narasi dan tindakan atas sebuah situasi yang dialami masyarakat yang memungkinkan

untuk menarik simpati dari publik yang tidak hanya berada di lingkungan sendiri namun transnasional.

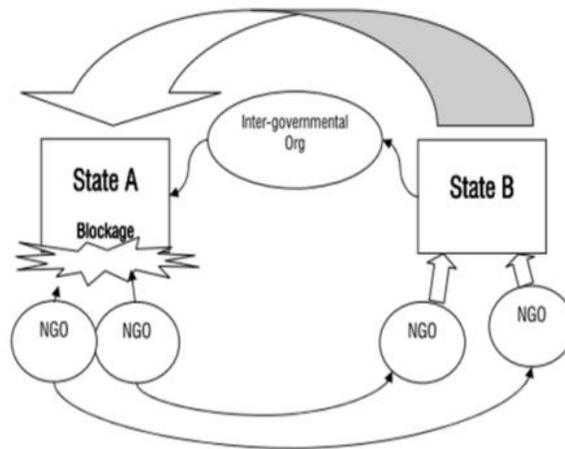
Leverage Politics merupakan kemampuan yang menggunakan seorang aktor yang berpengaruh atau yang kuat untuk dapat memberi kekuatan atau pengaruh kepada masyarakat luas agar mendapatkan sebuah dukungan dalam setiap pergerakan sebuah jaringan tersebut. Dalam leverage politics ini terdapat dua jenis pengaruh yaitu *material leverage* dan *moral leverage*.

Accountability Politics adalah upaya untuk mendorong aktor yang lebih kuat lagi untuk bertindak dalam sebuah kebijakan yang cenderung samar dan atau kebijakan yang sudah mereka ambil sebelumnya.

Dalam kerangka konseptual ini penulis mengambil pokok bahasan tentang bagaimana sebuah jaringan advokasi transnasional dapat mempengaruhi sebuah kebijakan dalam negara yang memiliki isu khusus. Melalui *boomerang pattern* dimana keterbukaan informasi dan akses dari masyarakat atau sekelompok organisasi kepada pemerintah terhalangi seperti yang terjadi di Mexico dimana telah terbukti lebih dari puluhan jurnalis terbunuh dan terancam, hal ini menjadi isu khusus untuk dibahas dan diperjuangkan oleh para aktivis dimana hal ini menjadi sebuah *boomerang pattern* karena kurangnya akses dari pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat atau sekelompok organisasi mencari bantuan ke luar negeri atau lebih tepatnya kepada *Committee to Protect Journalist*.

Gambar 1.1

Boomerang Pattern



Sumber: Keck & Sikkink, *Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics* (1998), hal. 13

Dalam *boomerang pattern* tersebut *Civic Society, Justice in Mexico* dan organisasi-organisasi non-pemerintahan domestik Meksiko menutup akses ke pemerintah atau melakukan *Blockage* sebagai bukti protes mereka terhadap pemerintah Meksiko yang tidak menangani permasalahan kekerasan terhadap jurnalis dan tidak melanjutkan penelusuran terkait pelaku kriminal terhadap jurnalis, mereka mencari bantuan dan memberikan informasi mereka terkait hal yang sedang terjadi di Meksiko ke organisasi Transnasional yang berada diluar Meksiko seperti *Committee to Protect Journalist*.

CPJ yang memiliki headquarter di Amerika Serikat menanggapi hal tersebut memberikan advokasi terhadap pemerintah amerika dan meksiko agar menanggapi permasalahan tersebut. Selanjutnya pemerintah amerika dan organisasi pemerintahan yaitu *Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)* dan *U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, kedua pihak ini sama-sama memberikan pressure terhadap pemerintah Meksiko untuk menangani permasalahan tersebut dengan serius.

E. Hipotesa

Advokasi *Committee to Protect Journalist* dalam menghilangkan angka impunitas pelaku kriminal terhadap jurnalis di Meksiko menggunakan

1. *Boomerang Pattern* dalam proses advokasinya lembaga swadaya masyarakat domestik membangun network dengan *non-governmental organizations (Committee to Protect Journalist)* di luar negeri yang bertujuan untuk menekan pemerintah Meksiko untuk menindaklanjuti kasus impunitas terhadap jurnalis.
2. *Committee to Protect Journalist* menggunakan Strategi Jaringan untuk mendapat sebuah pengaruh dari masyarakat luas dan pemerintah terhadap advokasi yang dilakukannya.
3. *Committee to Protect Journalist* menggunakan Analisis Kebijakan untuk mengetahui substansi kebijakan yang mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Meksiko terhadap kebebasan berekspresi.

F. Jangkauan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana advokasi CPJ dalam menangani permasalahan impunitas kepada pelaku kejahatan terhadap jurnalis di Mexico pada tahun 2014-2018. Penulis memilih negara Mexico sebagai objek penelitian karena dalam lima tahun terakhir ini kebebasan dalam pers di Meksiko mengalami penurunan dengan semakin meningkatnya kasus impunitas dan korban jiwa maupun korban ancaman yang terjadi terhadap jurnalis

G. Metode Penelitian

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif untuk melakukan dan memenuhi data agar pembahasan dapat dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Penulisan skripsi ini juga menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, yaitu :

1. Library Research, yakni proses pengumpulan data yang berasal dari buku maupun jurnal yang dapat memperkuat penjelasan dalam menyelesaikan masalah.
2. Media research, yakni proses pengumpulan data tambahan melalui berbagai berita di media baik itu yang berbentuk media cetak maupun media online yang ada di internet.
3. Analisa data, yakni proses menganalisa seluruh data yang telah dikumpulkan dan dijadikan satu agar mampu disesuaikan kecocokannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

H. Sistematika Kepenulisan

Pembahasan dalam topik skripsi ini akan disusun dan dijabarkan ke dalam lima bab yang saling berhubungan, terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan memaparkan tentang ulasan latar belakang masalah yang akan menjadi fokus perhatian, tujuan penulisan, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa atau praduga awal mengenai jawaban dari rumusan masalah yang ada, metode penelitian, jangkauan penelitian, serta rencana sistematika penulisan skripsi.

Bab II : *Committee to Protect Journalist (CPJ)*

Pada Bab II akan mendiskripsikan tentang profil sebuah organisasi non-profit dan non-pemerintahan CPJ, Latar belakang didirikannya CPJ dan beberapa kasus yang telah CPJ tangani di seluruh belahan dunia.

Bab III : Dinamika Kasus Impunitas terhadap jurnalis di Mexico

Bab III menjelaskan mengenai dinamika terjadinya kasus Impunitas terhadap jurnalis di Mexico dan memaparkan kasus yang telah terjadi dari tahun ke tahun terkait dengan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Mexico

Bab IV : Advokasi CPJ dalam menghilangkan masalah Impunitas Pelaku Kriminalitas Terhadap Jurnalis di Mexico

Bab IV akan berisi mengenai bagaimana advokasi CPJ yang dilakukan dalam usahanya untuk menghilangkan masalah impunitas terhadap jurnalis di Meksiko. Menjelaskan pengujian dari hipotesis yang sebelumnya telah dibuat penulis dan memberikan hasil akhir dari pengujian tersebut.

Bab V : Penutup

Bab V akan menyajikan kesimpulan akhir dari pembahasan masalah yang diteliti.